LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2029.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanawata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini. Semoga Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Kondisi Umum Wilayah Sumatera Utara 8
1.4.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah 9
1.4.2 Topografi Sumatera Utara 12
1.4.3 Geologi Sumatera Utara 13
1.4.4 Hidrologi Sumatera Utara 14
1.4.5 Klimatologi Sumatera Utara 15
1.4.6 Demografi Sumatera Utara 15
1.4.7 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 16
1.5 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM 18
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM **20**
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM 21
2.1.1 Bidang Pendidikan 21
2.1.2 Bidang Kesehatan 22
2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum 23
2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat 24
2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 25
2.1.6 Bidang Sosial 26
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM 27
2.2.1 Pendidikan 27
2.2.2 Kesehatan 27
2.2.3 Pekerjaan Umum 28
2.2.4 Perumahan Rakyat 28
2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 30
2.2.6 Sosial 30
2.3 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM dan Tim Penerapan SPM 31
2.3.1 Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 31
2.3.2 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 32
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM **40**
3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi 41
3.1.1 SPM Bidang Pendidikan 50
3.1.2 SPM Bidang Kesehatan 50
3.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum 50
3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat 52
3.1.5 SPM Bidang Trantibumlinmas 54
3.1.6 SPM Bidang Sosial 56
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM 59
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM **73**
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM 74
4.1.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 74
4.1.1.1 Bidang Pendidikan 74
4.1.1.2 Bidang Kesehatan 75
4.1.1.3 Bidang Pekerjaan Umum 76

4.1.1.4 Bidang Perumahan Rakyat 77
4.1.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 77
4.1.1.6 Bidang Sosial 78
4.2 Pemantauan dan Evaluasi SPM 86
4.3 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM 86
4.4 Koordinasi SPM 86
4.5 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM 86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 93
5.1 Kesimpulan 93
5.2 Saran 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	10
Tabel 2.1	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	22
Tabel 2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	23
Tabel 2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	24
Tabel 2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	25
Tabel 2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	26
Tabel 3.1	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang Pendidikan.....	39
Tabel 3.2	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang kesehatan.....	43
Tabel 3.3	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang pekerjaan umum.....	43
Tabel 3.4	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang perumahan rakyat.....	44
Tabel 3.5	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang trantibumlinmas.....	45
Tabel 3.6	Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang sosial.....	46
Tabel 3.7	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	59
Tabel 3.8	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	60
Tabel 3.9	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	62
Tabel 3.10	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	63
Tabel 3.11	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	65
Tabel 3.12	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Provinsi Sumatera Utara 2026-2029.....	68
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM.....	86



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warganya baik itu kebutuhan dasar maupun hak sipil sebagai warga negara. Hal ini diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dibentuknya pemerintah di negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia harus berupaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar warganya dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan, kebijakan, inovasi bahkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga. Bahkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukan bahwa prioritas negara bukan lagi hanya kinerja Pemerintah saja, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar, Penerapan dan Pelaporan SPM, Pembinaan dan Pengawasan SPM, dan ketentuan lain diantaranya yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Hal ini secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang bahkan mengamanatkan bahwa dokumen rencana dimaksud harus dimuat dalam RPJMD dan RKPD.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dimaksud dan sebagai bentuk komitmen dalam penerapan SPM, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2029 sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah pengampu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam melaksanakan program, penganggaran, pengawasan dan evaluasi kegiatan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Melalui rencana aksi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban negara secara optimal khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan SPM di Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta sinkronisasi dan koordinasi dalam penerapan SPM Daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Adapun tujuan Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah untuk (1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara; (2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran; (3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; (4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Sedangkan sasaran Rencana Aksi Penerapan SPM ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
2) Identifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber

pendanaan *alternative* dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.

1.4. Kondisi Umum Wilayah Sumatera Utara



1.4.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah



Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis lintang dan garis bujur yaitu 00 50' Lintang Selatan - 40 40' Lintang Utara dan 960 40' - 1000 50' Bujur Timur, memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah lain yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih luas sebesar 111.311,41 Km^2 yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 72.462,59 Km^2 dan luas perairan sebesar kurang lebih 38.848,82 Km^2 yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera bagian timur dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Sumatera Utara juga memiliki 229 pulau kecil dengan 2 pulau kecil terluar yaitu pulau Pulau Berhala yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga yang berada di Samudera Hindia.

Di wilayah Pantai Timur, secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 450 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km²)		Total (Km²)
						Darat	Laut	
1	Nias	Gido	10	170	0	902,395	1.735,74	2.562,15
2	Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.547,257	2.910,13	9.360,07
3	Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	4.201,035	343,67	4.641,82
4	Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.307,677	6.981,58	9.290,45
5	Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.895,604	-	3.895,60
6	Toba	Balige	16	231	13	2.291,616	-	2.291,62
7	Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.772,384	999,75	3.772,14
8	Asahan	Kisaran	25	177	27	3.737,830	1.175,84	4.913,67
9	Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.601,477	-	4.601,48
10	Dairi	Sidikalang	15	161	8	2.083,604	-	2.083,60
11	Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.206,876	-	2.206,88
12	Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.581.232	925,37	3.506,58
13	Langkat	Stabat	23	240	37	6.140,035	1.441,20	7.581,24
14	Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	2.531,703	12.875,20	15.406,90
15	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.351,514	-	2.351,51
16	Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.365,607	-	1.365,61
17	Samosir	Pangururan	9	128	6	1.850,035	-	1.850,04
18	Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.949,180	1.095,03	3.044,21
19	Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	888,142	2.111,17	2.999,37
20	Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	27	3.945,557	-	3.945,56
21	Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.914,413	-	3.914,41
22	Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.079,61	-	3.079,61
23	Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.686,013	409,67	4.095,68
24	Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.238,055	3.774,06	5.012,12
25	Nias Barat	Lahomi	8	105	0	464,219	1.327,11	1.791,30
26	Sibolga	Sibolga	4	0	17	11,471	67,96	80,28
27	Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	60,072	-	60,07
28	Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	75,919	-	75,92
29	Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	39,170	-	39,17
30	Medan	Medan	21	0	151	279,290	4,74	284,03
31	Binjai	Binjai	5	0	37	93,770	-	93,77
32	Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	159,298	-	159,30
33	Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	208,684	670,60	955,27
SUMATERA UTARA						**72.460,744**	**38.848,82**	**111.311,41**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka 2025

Berdasarkan karakteristik geografis wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Terdapat Danau Toba yang luasnya mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan karakteristik geografisnya wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok wilayah yaitu:

- Wilayah Pantai Timur
- Wilayah Pantai Barat

- Wilayah Dataran Tinggi
- Wilayah Kepulauan Nias

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan, adapun Kabupaten/Kota yang masuk kedalam empat kelompok wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya adalah sebagai berikut:

Wilayah Pantai Timur:

- Kab. Langkat
- Kota Binjai
- Kota Medan
- Kab. Deli Serdang
- Kab. Serdang Bedagai
- Kota Tebing Tinggi
- Kota Tanjung Balai
- Kab. Batubara
- Kab. Asahan
- Kab. Labuhanbatu Utara
- Kab. Labuhanbatu
- Kab. Labuhanbatu Selatan

Wilayah Dataran Tinggi:

- Kab. Karo
- Kab. Dairi
- Kab. Pakpak Bharat
- Kab. Humbang Hasundutan
- Kab. Samosir
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Toba
- Kab. Simalungun
- Kota Pematang Siantar

Wilayah Pantai Barat:

- Kab. Tapanuli Tengah
- Kab. Tapanuli Selatan
- Kota Sibolga
- Kota Padang Sidimpuan
- Kab. Mandailing Natal
- Kab. Padanglawas
- Kab. Padanglawas Utara

Wilayah Kepulauan Nias:

- Kab. Nias
- Kota Gunung Sitoli
- Kab. Nias Utara
- Kab. Nias Barat
- Kab. Nias Selatan



1.4.2 Topografi Sumatera Utara



Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12% seluas 47.810 Km^2, antara 12 – 40% seluas 6.305 Km dan diatas 40% seluas 17.719 Km^2, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 1.129,20 Ha atau 1,57% . Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 mdpl.

Kondisi daratan terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah Barat Laut-Tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian Timur dan pesisir Barat. Kemiringan tanah antara 0 – 12% seluas 47.810 Km^2 , antara 12 – 40% seluas 6.305 Km^2 dan diatas 40% seluas 17.719 Km^2.

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33% dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300 - 600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70% dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96% dari luas daratan Sumatera Utara.

1.4.3 Geologi Sumatera Utara



Dari sisi geologi, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat.

Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari *non clastic*, dengan daya dukung kecil atau sedang;
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

1.4.4 Hidrologi Sumatera Utara



Secara hidrologi di Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa sungai utama dengan debit air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air minum selain itu juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36% dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64%.

Disamping sungai, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar di beberapa Kabupaten antara lain di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, Kab Simalungun, Tapanuli Tengah, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

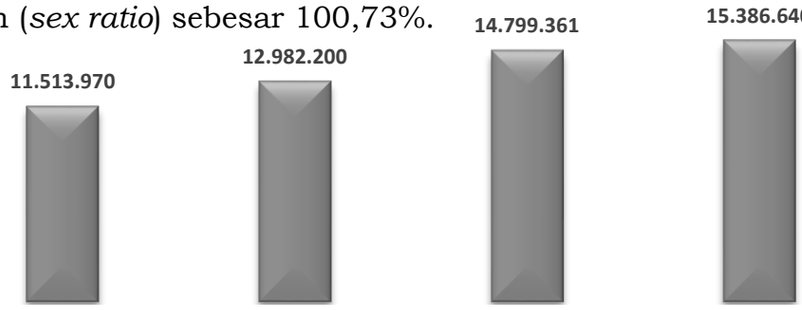
1.4.5 Klimatologi Sumatera Utara



Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celsius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celsius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/ *humidity* minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9%. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70 – 4,51%.

1.4.6 Demografi Sumatera Utara

Penduduk Sumatera Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebesar 15.386.640 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2023 sebesar 1,43%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.721.314 jiwa (50,18%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.665.326 jiwa (49,82%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,73%.



Dari grafik diatas jumlah penduduk Sumatera Utara dari tahun 2000 yang tercatat sebanyak 11.513,97 ribu jiwa dengan proyeksi interim jumlah penduduk di Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 15. 386.640 ribu jiwa. Selanjutnya, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28% per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22%.

Provinsi Sumatera Utara memiliki total penduduk sejumlah 15.386.640 jiwa dengan komposisi laki laki sebesar 50,2% dan perempuan sebesar 49,8%. Sebagian besar penduduk Sumatera Utara berada di kawasan Pantai Timur mencapai 9.386.897 jiwa (61,01%), kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.994.461 jiwa (19,46%), kawasan Pantai Barat sebanyak 2.074.988 jiwa (13.48%) dan Kepulauan Nias sebanyak 930,294 Jiwa (6,05%).

Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.474.166 jiwa (16,08%) dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang sebesar 2.018.164 jiwa (13,12%), Kabupaten Langkat 1.066.711 jiwa (6.93%), Kabupaten Simalungun 1.035.920 jiwa (6,73%), dan Kabupaten Asahan 802.563 jiwa (5,22%). Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang berjumlah 55.172 jiwa (0,36%), Kota Sibolga 91.265 jiwa (0,59%), Kabupaten Nias Barat 95.334 jiwa (0,62%), Kabupaten Samosir 141.333 jiwa (0,92%), Kota Gunungsitoli 142.890 jiwa (0,93%), dan Kabupaten Nias 153.658 jiwa (1%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/ kota lainnya masing-masing dibawah 5%.

1.4.7 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku dapat menunjukan struktur ekonomi sedangkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat menunjukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 sebesar Rp 1.146,920 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 24,44 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,79 persen dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 18,36 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 38,41 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan

inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar Rp 632,53 triliun. Kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,12 persen, diikuti oleh Kategori Peyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen dan Kategori Jasa Lainnya sebesar 9,55 persen.

Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 5,01 persen. PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2024 sebesar Rp 73,57 juta. Sementara itu, berdasarkan harga Konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp 39,14 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 40,58 juta pada tahun 2024.

Untuk menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa oleh berbagai golongan konsumen, maka digunakan PDRB menurut pengeluaran. Dari Rp 1.146,92 triliun, nilai barang dan jasa di Sumatera Utara sebagian besar dikonsumsi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu mencapai Rp 583,17 triliun (50,85%). Selanjutnya untuk Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp 450,24 triliun (39,26%), Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp 328,63 triliun (28,65%), Impor Barang dan Jasa sebesar Rp 306,17 triliun (26,70%), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp 64,74 triliun (5,65%), Pengeluaran Inventori sebesar Rp 15,77 triliun (1,38%) dan untuk Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar Rp 10,52 triliun (0,88%).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Jika diamati angka pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22%, dan Jasa Lainnya sebesar 9,55%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 1,93%, diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,16% dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang sebesar 2,89%.

Pada tahun 2023, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,27% atau dari Rp.5,84 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.6,38 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 5,59%, meningkat dari Rp.284,24 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.301,53 triliun pada tahun 2023 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,48% dengan nilai Rp.173,27 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp.181,08 triliun di tahun 2023. Sedangkan komponen Ekspor dan Komponen Impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,40% dan 1,70% pada tahun 2023.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan

berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,72%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 37,62%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,52%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,84%, Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,91%, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,88%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,48%.

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 8,57%, yaitu dari Rp.62,92 juta pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.68,31 juta pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 3,65% sampai dengan 5,34%. Bahkan ada 12 kabupaten/kota yang tumbuh diatas 5%. Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,34%, diikuti oleh Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,14%, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 5,11%, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 5,10%, dan Kota Padang Sidempuan sebesar 5,09%. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 3,65%.

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 28,99%, dengan nilai PDRB sebesar 303,31 triliun rupiah. Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,30%, dengan nilai PDRB mencapai 139,10 triliun rupiah, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar 56,19 triliun rupiah atau sebesar 5,37% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun sebesar 4,99%, Kabupaten Asahan berperan sebesar 4,90% , Kabupaten Labuhanbatu sebesar 4,37% , dan Kabupaten Batu Bara berperan sebesar 4,18%. Sedangkan lima kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,54%, Kabupaten Nias sebesar 0,46%, Kabupaten Nias Utara sebesar 0,43%, Kabupaten Nias Barat sebesar 0,22%, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,15%.

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2023 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp. 113.796.554, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 113.617.434, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 101.676.287, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 89.062.439, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 82.791.651. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp. 22.415.953 diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 24.508.628, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 28.271.066, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp. 28.727.670 dan Kabupaten Tapanuli Utara Rp. 32.465.607

1.5 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara













BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pendidikan Provinsi							
	Pendidikan Menengah			Pendidikan Khusus			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Menengah			Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Khusus				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Utara	268.280	268.280	91,00	1.033	1.033	92,44	166.946.801.651	158.023.273.594

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang Kesehatan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Capaian (%)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani			
Sumatera Utara	272.614	272.614	100,00	624.452	624.452	99,27	929.795.357	837.129.059

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota				
	Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota			Layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Utara	7.850	7.850	100,00	109.455	109.455	100,00	Tidak diisi anggarannya	Tidak diisi anggarannya

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi				
	Warna Negara yang korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Utara	Tidak terjadi bencana	Tidak terjadi bencana	100,00	Tidak ada relokasi	Tidak ada relokasi	100,00	727.175.430	Tidak diisi anggarannya

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(17)	(18)
Sumatera Utara	400	400	99,67	9.734.108.764	3.291.046.529

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial															Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Rehabilitasi Sosial																
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				
	Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total Terlayani	Capaian (%)		
Sumatera Utara	803	803	100,00	345	345	100,00	339	339	100,00	230	230	100,00	1.355	1.355	100,00	25.832.581.817	24.713.927.734

Sumber : Laporan aplikasi eSPM

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

2.2.1 Pendidikan

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa pelayanan dasar SPM urusan bidang pendidikan masih menemui berbagai permasalahan diantaranya:

a. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SMKN Sayurmatinggi di Cabang Dinas Wilayah XI tidak terlaksana karena efisiensi.
b. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SMKN Nibung Hangus di Cabang Dinas Wilayah VI tidak dapat dilanjutkan (putus kontrak) karena progres pembangunan hanya capai 30 % sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
c. Anggaran untuk Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah masih mengandalkan anggaran dari DAK baik melalui dana BOS maupun BOP dari Kementerian/Lembaga yang peruntukannya tidak inline/terintegrasi dengan pemenuhan indikator SPM; dan
d. Belum ada sumber data yang up-to-date dan tersinkronisasi sebagai sumber data yang sama, antar perangkat daerah dan lembaga terkait, diantaranya: Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Agama (Kemenag), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.2.2 Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, diantaranya sebagai berikut:

a. Keterlambatan pencatatan dan pelaporan masalah krisis kesehatan disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan tugas rangkap (*double job*).
b. Mitigasi dan Deteksi Dini Pra Krisis Kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan mitigasi dan koordinasi bersama Lintas Sektor terkait.
c. Kabupaten/Kota belum menyusun kontijensi dan respons penganggulangan bencana
d. Pada saat bencana, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respon pelayanan kesehatan, tetapi ternyata di lapangan masyarakat lebih membutuhkan pangan cepat saji,

air bersih, tenda pengungsian bersifat klaster serta WC umum. Sementara posko kesehatan adalah area pelayanan kesehatan.

e. Kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi sinyal KLB serta keterlambatan mengirimkan laporan/informasi bilamana terjadi KLB.
f. Tidak semua daerah yang terjadi KLB menetapkan status KLB di wilayahnya.
g. Pada beberapa KLB jumlah orang terdampak berada di kecamatan yang berbeda-beda sehingga butuh waktu untuk menentukan jumlah populasi yang berisiko.
h. Untuk KLB keracunan makanan pengambilan datanya belum dilakukan dengan optimal sehingga mempengaruhi dalam pemeriksaan sampel yang akan diperiksa. Sampel makanan pada KLB keracunan makanan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium.
i. Belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan pelaporan jika terjadi bencana atau KLB wabah. Solusi dari permasalahan ini adalah Melaksanakan bimbingan dan pemantauan ke Kab/Kota di wilayah Prov. Sumatera Utara sehingga dapat Terpantaunya kejadian bencana dan atau KLB di wilayah Provinsi Sumatera Utara; dan
j. Tidak semua Kab/Kota mempunyai anggaran pada saat bencana maupun KLB wabah. Solusi dari permasalahan ini adalah Melaksanakan fasilitasi ke kabupaten Kota jika terjadi bencana atau KLB wabah sehingga dapat Terpenuhinya pelayanan kepada Masyarakat terdampak krisis Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

2.2.3 Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Mebidang terutama pada pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) pada Jalan Nasional (Jl. Gatot Subroto) belum dapat dilaksanakan akibat izin pemanfaatan bahu jalan untuk penanaman pipa JDU baru terbit pada bulan Desember 2022, sehingga reservoir Kota Medan belum dapat difungsikan.
b. Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang baru mempersiapkan perencanaan untuk Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Distribusi Layanan (JDL) pada tahun 2023, sehingga rencana pembangunan JDB dan JDL baru dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2024.
c. Secara fakta sebenarnya sudah dilaksanakan Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang dilakukan oleh Perumda Tirtanadi yang merupakan pengelola air minum Provinsi

Sumatera Utara, tetapi pelayanannya langsung sampai kepada Sambungan Rumah.

d. Terhadap layanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Perumda Tirtanadi di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (wilayah perbatasan Medan-Deli Serdang) secara fakta sudah dilakukan pengelolaannya secara regional, tetapi sampai saat ini tidak ada pernyataan kerjasama antara Pemprovsu-Kota Medan-Kabupaten Deli Serdang.

2.2.4 Perumahan Rakyat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, diantaranya:

a. Belum optimalnya SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah karena sampai saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pendataan permukiman "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan daerah Sempadan sungai di Provinsi Sumatera Utara.
b. Permasalahan dalam pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu penetapan status terhadap Bencana di Provinsi oleh Gubernur, sehingga Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pendataan rumah secara lengkap terhadap masyarakat yang terkena bencana, Pemerintah Provinsi hanya dapat memberikan bantuan fasilitasi dalam dukungan anggaran dan program kepada Gubernur Sumatera Utara. Solusi dari permasalahan tersebut adalah memberikan rekomendasi kepada Pihak terkait dalam pentingnya sebuah Pedoman Dasar berupa Surat Keterangan Sumatera Utara terhadap bencana dengan skala besar atau lintas kabupaten/kota;
c. Penanganan rumah di bantaran sungai, secara regulasi pembangunan rumah di bantaran sungai, tidak di izinkan tetapi seiring dengan tidak adanya ketegasan dalam penertiban, rumah di sekitar bantaran tersebut mengakibatkan adanya risiko terhadap bencana banjir bandang serta longsor di tepian bantaran sugai tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlunya dorongan pihak/ *stakeholder* terkait dalam penegasan pelanggaran pembangunan tempat tinggal yang melanggar aturan yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan rekomendasi tempat tinggal yang layak dengan merelokasi dari tempat semula;
d. Pelaksanaan SPM khusus Kebencanaan ini sampai saat ini sifatnya Bantuan Sosial dari Gubernur Sumatera Utara untuk

masyarakat, Perangkat Daerah mengawal dan memberikan regulasi terhadap penerima bantuan serta melaporkan aliran dana yang di gunakan untuk SPM kebencanaan tersebut adanya permintaan dari Kabupaten/Kota melalui SK Bupati atau Walikota menjadi dasar dalam pemberian bantuan Keuangan dan lainya sehingga Penetapan SK Gubernur Sumatera Utara menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberiaan bantuan terhadap Kabupaten/Kota yang terkena dampak bencana tersebut; dan

e. Sumber pendanaan melalui Dana BTT di tingkat Pemerintah Provinsi seharusnya dapat di keluarkan secara khusus untuk dana darurat untuk masyarakat sedang terjadi bencana maupun pasca bencana, serta adanya penegasan penjelasan-penjelasan aturan yang lebih detail terkait usulan ke kabupaten/kota terlebih dahulu untuk permohonan bantuan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah Keterbatasan anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan bantuan pendanaan dan bertumpu kepada Dana BTT Provinsi Sumatera Utara serta adanya Hibah Kompetitif yang mungkin dapat menjadi solusi dalam urgensi ke Kabupaten/Kota.

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang trantibumlinmas yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, diantaranya sebagai berikut:

a. Belum terintegrasinya penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara.
b. Belum intensifnya pelaksanaan koordinasi OPD dalam penerapan dan pemberhasilan pencapaian SPM.
c. Belum memadainya anggaran untuk penerapan SPM.
d. Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan SPM.
e. Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan SPM.
f. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penerapan SPM sub urusan Trantibumlinmas;
g. Belum tersedianya SDM Aparatur Satpol PP yang kompeten baik secara kualitas dan kuantitas untuk penerapan SPM sub urusan Trantibumlinmas; dan
h. Belum tersedianya komponen khusus terkait "penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada

2.2.6 Sosial

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, diantaranya sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai Permensos RI No. 9 tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan.
b. Jumlah personil atau pegawai yang belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga dengan latar belakang Pekerja Sosial Profesional. Untuk mengatasi hal tersebut menunjuk tenaga personal yang ada untuk menjadi pekerja sosial.
c. Permasalahan dalam penerapan SPM ada pada tahapan pendataan. Pendataan sasaran penerima pelayanan dasar adalah kewenangan Dinas Sosial Kab/Kota, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengkompilasi data tersebut dan memisahkan jumlah penerima pelayanan dasar yang membutuhkan panti dengan jumlah penerima pelayanan dasar yang tidak membutuhkan panti. Berdasarkan data tersebut disusun kebutuhan sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar (Permensos No. 9 tahun 2018), dan di rencanakan pemenuhannya untuk waktu yang ditentukan. Permasalahannya adalah tidak dapat mengukur capaian kinerja penerapan SPM dalam panti karena tidak ketersediaan data populasi yang berhak mendapat pelayanan dasar di dalam panti. Kondisi saat ini yang menjadi target penerapan SPM dalam panti adalah jumlah kapasitas panti;

2.3 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM dan Tim Penerapan SPM

2.3.1 Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 disebutkan bahwa:

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
f. Sosial.

Pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar
(3) Pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 298 ayat 1 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan: Sub urusan Manajemen Pendidikan Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan pendidikan Menengah dan Pengelolaan pendidikan khusus;
2. Kesehatan: Kewenanangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Pekerjaan Umum: Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota serta Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik regional;
4. Perumahan Rakyat: Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
5. Tramtibumlinmas: Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi, Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan Pembinaan PPNS provinsi. Untuk sub urusan bencana dan kebakaran walaupun untuk pemerintah provinsi tidak ada indikator SPMnya tetapi pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penanggulangan bencana provinsi dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;

6. Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti dan untuk penanganan bencana: penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.

2.3.2 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

(1) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

(3) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

(4) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
   f. Sosial

(2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.

(3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang:

a. bersifat mutlak;
b. mudah distandarkan
c. yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 4 disebutkan:

(1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;dan
   f. Sosial
(2) Materi muatan SPM mencakup:
   a. Jenis Pelayanan Dasar;
   b. Mutu Pelayanan Dasar;
   c. penerima Pelayanan Dasar.

Bidang Pendidikan Provinsi:

(1) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
   a. Pendidikan menengah
   b. Pendidikan khusus.
(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
   b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu warga negara dengan ketentuan:
   a. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
   b. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;

SPM Kesehatan Daerah Provinsi:

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:
   a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
   b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan;
c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
a. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
b. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;

SPM Pekerjaan Umum Provinsi

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas:
a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

(2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

(3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.

SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara denganketentuan:
   a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
   b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:
   a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
   b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
   c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;

SPM Sosial Daerah Provinsi

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
   a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
   b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
   c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
   d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
   e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
   b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
   c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3) Penerima Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
c. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

Penerapan SPM

Pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. Pengumpulan data;
    b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
    c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
    d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
(3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pengumpulan Data

Pada Pasal 12

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
    a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang

berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal;

b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

(4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan Kebutuhan

Pasal 13

(1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

(2) Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 14

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.

(2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:

a. Menyediakan barang dan/atau jasa yangdibutuhkan;

b. Melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:

a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi

Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1 SPM Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang Pendidikan

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
1	1.01.02	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.0001	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
			1.01.02.1.01.0003			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.01.0010			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.01.0011			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.01.0012			5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.1.01.0013			6	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0014			7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0015			8	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.1.01.0016			9	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
			1.01.02.1.01.0019			10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.01.0020			11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.01.0022			12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang
			1.01.02.1.01.0023			13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang
			1.01.02.1.01.0024			14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang
			1.01.02.1.01.0025			15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang
			1.01.02.1.01.0026			16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang
			1.01.02.1.01.0027			17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.01.0028			18	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.01.0029			19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.1.01.0036			20	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			1.01.02.1.01.0037			21	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			1.01.02.1.01.0038			22	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			1.01.02.1.01.0039			23	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			1.01.02.1.01.0040			24	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0041			25	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
			1.01.02.1.01.0043			26	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0045			27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik
			1.01.02.1.01.0046			28	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			1.01.02.1.01.0049			29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			1.01.02.1.01.0050			30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
			1.01.02.1.01.0051			31	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
			1.01.02.1.01.0052			32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan
			1.01.02.1.01.0053			33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan
			1.01.02.1.01.0054			34	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
			1.01.02.1.01.0055			35	Pemeliharaan Mebel	Unit
			1.01.02.1.01.0056			36	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang
			1.01.02.1.01.0057			37	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			1.01.02.1.01.0058			38	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			1.01.02.1.01.0059			39	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.1.01.0060			40	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			1.01.02.1.01.0061			41	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			1.01.02.1.01.0063			42	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			1.01.02.1.01.0064			43	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
			1.01.02.1.01.0065			44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			1.01.02.1.01.0066			45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			1.01.02.1.01.0067			46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0068			47	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0069			48	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0070			49	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
			1.01.02.1.01.0071			50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang
			1.01.02.1.01.0072			51	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
			1.01.02.1.01.0073			52	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0074			53	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.1.01.0075			54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.1.01.0076			55	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
			1.01.02.1.01.0077			56	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.1.01.0078			57	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			1.01.02.1.01.0079			58	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.1.01.0080			59	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
2	1.01.02	1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.0001		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit
			1.01.02.1.02.0003			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.02.0004			3	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang
			1.01.02.1.02.0005			4	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
			1.01.02.1.02.0006			5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.02.0007			6	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.02.0008			7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.1.02.0009			8	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0010			9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0011			10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.1.02.0012			11	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0016			12	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.02.0018			13	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang
			1.01.02.1.02.0019			14	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.02.0028			15	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			1.01.02.1.02.0029			16	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			1.01.02.1.02.0030			17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			1.01.02.1.02.0031			18	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			1.01.02.1.02.0032			19	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0033			20	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket

NO	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*
	1.01.02.1.02.0035			21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.1.02.0037			22	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta didik
	1.01.02.1.02.0038			23	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	1.01.02.1.02.0041			24	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
	1.01.02.1.02.0042			25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah MenengahKejuruan	Orang
	1.01.02.1.02.0043			26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
	1.01.02.1.02.0045			27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
	1.01.02.1.02.0046			28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
	1.01.02.1.02.0047			29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
	1.01.02.1.02.0048			30	Pemeliharaan Mebel	Unit
	1.01.02.1.02.0049			31	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang
	1.01.02.1.02.0050			32	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.1.02.0051			33	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.1.02.0052			34	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.1.02.0053			35	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.1.02.0054			36	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.1.02.0056			37	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang
	1.01.02.1.02.0057			38	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
	1.01.02.1.02.0058			39	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	1.01.02.1.02.0059			40	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	1.01.02.1.02.0060			41	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
			1.01.02.1.02.0061			42	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			1.01.02.1.02.0062			43	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0063			44	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang
			1.01.02.1.02.0064			45	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			1.01.02.1.02.0065			46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0066			47	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.1.02.0067			48	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0068			49	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
			1.01.02.1.02.0069			50	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.02.0070			51	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.1.02.0071			52	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0072			53	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			1.01.02.1.02.0073			54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.1.02.0074			55	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.02.0075			56	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.02.0076			57	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.1.02.0077			58	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.1.02.0078			59	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Orang
3	1.01.02	1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.0001		Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			1.01.02.1.03.0003			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.03.0004			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.03.0005			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.03.0006			5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang

NO	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2	3	4	5		6
	1.01.02.1.03.0007			6	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
	1.01.02.1.03.0008			7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.1.03.0009			8	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
	1.01.02.1.03.0010			9	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
	1.01.02.1.03.0012			10	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
	1.01.02.1.03.0013			11	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang
	1.01.02.1.03.0014			12	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang
	1.01.02.1.03.0015			13	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang
	1.01.02.1.03.0016			14	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang
	1.01.02.1.03.0017			15	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang
	1.01.02.1.03.0028			16	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang
	1.01.02.1.03.0029			17	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
	1.01.02.1.03.0030			18	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang
	1.01.02.1.03.0031			19	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang
	1.01.02.1.03.0032			20	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang
	1.01.02.1.03.0033			21	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang
	1.01.02.1.03.0034			22	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang
	1.01.02.1.03.0035			23	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
	1.01.02.1.03.0036			24	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	1.01.02.1.03.0037			25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	1.01.02.1.03.0038			26	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	1.01.02.1.03.0039			27	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.1.03.0040			28	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket

NO	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*
	1.01.02.1.03.0042			29	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.1.03.0044			30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta Didik
	1.01.02.1.03.0045			31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	1.01.02.1.03.0048			32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
	1.01.02.1.03.0049			33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
	1.01.02.1.03.0050			34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang
	1.01.02.1.03.0051			35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
	1.01.02.1.03.0052			36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
	1.01.02.1.03.0053			37	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang
	1.01.02.1.03.0054			38	Pemeliharaan Mebel	Unit
	1.01.02.1.03.0055			39	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang
	1.01.02.1.03.0056			40	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.1.03.0057			41	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.1.03.0058			42	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.1.03.0059			43	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.1.03.0060			44	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.1.03.0062			45	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Orang
	1.01.02.1.03.0063			46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	1.01.02.1.03.0064			47	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	1.01.02.1.03.0065			48	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang
	1.01.02.1.03.0066			49	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

NO	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*		*6*
			1.01.02.1.03.0067			50	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.03.0068			51	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.03.0069			52	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.1.03.0070			53	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			1.01.02.1.03.0071			54	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			1.01.02.1.03.0072			55	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.1.03.0073			56	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.1.03.0074			57	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.1.03.0075			58	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.1.03.0076			59	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.1.03.0077			60	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.03.0078			61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.1.03.0079			62	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			1.01.02.1.03.0080			63	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.1.03.0081			64	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			1.01.02.1.03.0082			65	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang
			1.01.02.1.03.0083			66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			1.01.02.1.03.0084			67	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
	1.01.02	1.01.02.3.03	1.01.02.3.03.0061			68	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Orang
			1.01.02.3.03.0062			69	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga

3.1.2 SPM Bidang Kesehatan

Tabel 3.2 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang Kesehatan

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
1	1.02.02	1.02.02.4.02	1.02.02.1.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang
			1.02.02.1.02.0002			2 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3.3 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang Pekerjaan Umum

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
1	1.03.03	1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.0013	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
			1.03.03.1.01.0014			14 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
			1.03.03.1.01.0015			15 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
			1.03.03.1.01.0016			16 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
			1.03.03.1.01.0017			17 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik
			1.03.03.1.01.0018			18 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik
			1.03.03.1.01.0019			19 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
			1.03.03.1.01.0020			20 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit
			1.03.03.1.01.0021			21 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
2	1.03.05	1.03.05.1.01	1.03.05.1.01.0010	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	10 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
			1.03.05.1.01.0011			11 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari
			1.03.05.1.01.0012			12 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit
			1.03.05.1.01.0013			13 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari
			1.03.05.1.01.0014			14 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
			1.03.05.1.01.0015			15 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen
			1.03.05.1.01.0016			16 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
			1.03.05.1.01.0017			17 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga
			1.03.05.1.01.0018			18 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit

3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3.4 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang Perumahan Rakyat

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
1	1.04.02	1.04.02.1.01	1.04.02.1.01.0002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			1.04.02.1.01.0003			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			1.04.02.1.01.0006			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
			1.04.02.1.01.0007			7 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			1.04.02.1.01.0008			8 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			1.04.02.1.01.0009			9 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen
			1.04.02.1.01.0010			10 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
			1.04.02.1.01.0011			11 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.02	1.04.02.1.02.0001		2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
			1.04.02.1.02.0004			4 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang
			1.04.02.1.02.0006			6 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen
			1.04.02.1.02.0007			7 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Orang
			1.04.02.1.02.0008			8 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2		3	4	5	6
		1.04.02.1.02.0009			9 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
		1.04.02.1.02.0010			10 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
	1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.0001		3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0004			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0006			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0007			7 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.03.0008			8 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0009			9 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0010			10 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.03.0011			11 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0012			12 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
	1.04.02.1.03	1.04.02.1.04.0003		4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.04.0004			4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan
		1.04.02.1.04.0005			5 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.04.0006			6 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.04.0007			7 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen

3.1.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.5 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang trantibumlinmas

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
1	1.05.02	1.05.02.1.01	1.05.02.1.01.0006	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen
			1.05.02.1.01.0008			8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen
			1.05.02.1.01.0010			10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang
			1.05.02.1.01.0011			11 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
			1.05.02.1.01.0012			12 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen
			1.05.02.1.01.0013			13 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit
			1.05.02.1.01.0014			14 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
			1.05.02.1.01.0015			15 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
			1.05.02.1.01.0016			16 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan
			1.05.02.1.01.0017			17 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan
			1.05.02.1.01.0018			18 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			1.05.02.1.01.0019			19 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa	Laporan

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2			3	4	5	6
						dan Kerusuhan Massa	
		1.05.02.1.02	1.05.02.1.02.0001		2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			1.05.02.1.02.0002			2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			1.05.02.1.02.0003			3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			1.05.02.1.02.0004			4 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit
			1.05.02.1.02.0005			5 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			1.05.02.1.02.0006			6 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen
			1.05.02.1.02.0007			7 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan
			1.05.02.1.02.0008			8 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			1.05.02.1.02.0009			9 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
		1.05.02.1.03	1.05.02.1.03.0001		3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
			1.05.02.1.03.0003			3 Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
			1.05.02.1.03.0004			4 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
			1.05.02.1.03.0005			5 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
			1.05.02.1.03.0006			6 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan

3.1.6 SPM Bidang Sosial

Tabel 3.6 Strategi pencapaian SPM Provinsi Sumatera Utara bidang sosial

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
1	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.0001	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1 Penyediaan permakanan	Orang
			1.06.04.1.01.0002			2 Penyediaan sandang	Orang
			1.06.04.1.01.0003			3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			1.06.04.1.01.0004			4 Penyediaan alat bantu	Orang
			1.06.04.1.01.0005			5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			1.06.04.1.01.0006			6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			1.06.04.1.01.0007			7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			1.06.04.1.01.0008			8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
			1.06.04.1.01.0009			9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			1.06.04.1.01.0010			10 Pemberian pelayanan penelusuran peluarga	Orang
			1.06.04.1.01.0011			11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			1.06.04.1.01.0012			12 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen
		1.06.04.1.02	1.06.04.1.02.0001		2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Pengasuhan	Orang
			1.06.04.1.02.0002			2 Penyediaan makanan	Orang
			1.06.04.1.02.0003			3 Penyediaan sandang	Orang
			1.06.04.1.02.0004			4 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			1.06.04.1.02.0005			5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			1.06.04.1.02.0006			6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			1.06.04.1.02.0007			7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			1.06.04.1.02.0008			8 Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang
			1.06.04.1.02.0009			9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			1.06.04.1.02.0010			10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			1.06.04.1.02.0011			11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang

No	Kode			Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Satuan
1	*2*			*3*	*4*		*5*		*6*
			1.06.04.1.02.0012				12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti	Orang
			1.06.04.1.02.0013				13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen
		1.06.04.1.03	1.06.04.1.03.0001		3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1	Penyediaan permakanan	Orang
			1.06.04.1.03.0002				2	Penyediaan sandang	Orang
			1.06.04.1.03.0003				3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			1.06.04.1.03.0004				4	Penyediaan alat bantu	Orang
			1.06.04.1.03.0005				5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang
			1.06.04.1.03.0006				6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang
			1.06.04.1.03.0007				7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			1.06.04.1.03.0008				8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
			1.06.04.1.03.0009				9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			1.06.04.1.03.0010				10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			1.06.04.1.03.0011				11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			1.06.04.1.03.0012				12	Pemulasaraan	Orang
			1.06.04.1.03.0013				13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen
		1.06.04.1.04	1.06.04.1.04.0001		4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	Penyediaan permakanan	Orang
			1.06.04.1.04.0002				2	Penyediaan sandang	Orang
			1.06.04.1.04.0003				3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang
			1.06.04.1.04.0004				4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang
			1.06.04.1.04.0005				5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang
			1.06.04.1.04.0006				6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang
			1.06.04.1.04.0007				7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang
			1.06.04.1.04.0008				8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*
			1.06.04.1.04.0009			9 Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			1.06.04.1.04.0010			10 Pemulangan ke daerah asal	Orang
			1.06.04.1.04.0011			11 Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen
2	1.06.06	1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.0001	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			1.06.06.1.01.0002			2 Penyediaan Sandang	Orang
			1.06.06.1.01.0003			3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
			1.06.06.1.01.0004			4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			1.06.06.1.01.0005			5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.7 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator / Kinerja / Jasa Layanan SPM	Satuan	Target Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Kinerja Daerah		Realisasi Pencapaian Kinerja Daerah						Pencapaian Kinerja Daerah		Realisasi Pencapaian Kinerja Daerah						Pencapaian Kinerja Daerah		Realisasi Pencapaian Kinerja Daerah						Pencapaian Kinerja Daerah		Realisasi Pencapaian Kinerja Daerah						Pencapaian Kinerja Daerah		Realisasi Pencapaian Kinerja Daerah							
				Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Anggaran				Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Anggaran				Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Anggaran				Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Anggaran				Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Murni Layanan Dasar	Realisasi Murni Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	SPM TERMID IKASI							**1.510.860.250.705**								**1.800.387.460.2 86**								**1.812.387.460.2 86**								**1.824.387.460.2 86**								**1.836.387.460.2 86**			
1	**Pendidikan Menengah**	orang	1.498.070	265000	265000			174.379.737.776		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	275000	275000			191.817.711.553		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	285000	285000			335.322.696.064		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	295000	295000			340.322.696.064		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	305000	305000			345.322.696.064		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (14-18 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100,00	78,99	78,99							79,40	79,40							79,80	79,80							80,20	80,20							80,60	80,60						
	SMA							48.466.115.493		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN													194.817.711.553								197.817.711.553								200.817.711.553			
1	Kemampuan literasi	Nilai	64,39			69,01	69,01							69,61	69,61							70,21	70,21							70,81	70,81							71,41	71,41						
2	Kemampuan numerasi	Nilai	38,61			60,95	60,95							62,55	62,55							64,15	64,15							65,75	65,75							67,35	67,35						
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,89			78,79	78,79							79,99	79,99							81,19	81,19							82,39	82,39							83,59	83,59						
4	Indeks iklim kebhinneka	Nilai	60,05			72,09	72,09							73,09	73,09							74,09	74,09							75,09	75,09							76,09	76,09						
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80,98			59,81	59,81							61,31	61,31							62,81	62,81							64,31	64,31							65,81	65,81						
	SMK							125.913.622.283		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN					138.504.984.511		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN					140.504.984.511		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN					142.504.984.511		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN					144.504.984.511		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	74,07			62,06	62,06							63,36	63,36							64,66	64,66							65,96	65,96							67,26	67,26						
2	Kemampuan numerasi	Nilai	82,3			55,83	55,83							58,03	58,03							60,23	60,23							62,43	62,43							64,63	64,63						
3	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	53,41			72,75	72,75							73,01	73,01							73,28	73,28							73,54	73,54							73,80	73,80						
4	Kepuasan mitra kerja terhadap lulusan SMK	Persentase	3,99			83,63	83,63							84,17	84,17							84,71	84,71							85,25	85,25							85,79	85,79						
5	Indeks iklim keamanan	Nilai	61,7			66,47	66,47							67,67	67,67							68,87	68,87							70,07	70,07							71,27	71,27						
6	Indeks iklim kebhinneka	Nilai	61,7			69,01	69,01							70,31	70,31							71,61	71,61							72,91	72,91							74,21	74,21						
7	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0,53			56,41	56,41							58,71	58,71							61,01	61,01							63,31	63,31							65,61	65,61						
2	**Pendidikan Khusus**	orang	2007 5	1.000	1.000					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	1100 0	1100 0			-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2100 0	2100 0			-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	3100 0	3100 0					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	4100 0	4100 0					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100,00	66	66							74,38	74,38							75,47	75,47							76,56	76,56							77,65	77,65						
	SDLB																	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN						
1	Kemampuan literasi	Nilai	69,46			58,62	58,62							60,22	60,22							61,82	61,82							63,42	63,42							65,02	65,02						
2	Kemampuan numerasi	Nilai	56,3			52,79	52,79							53,39	53,39							53,99	53,99							54,59	54,59							55,19	55,19						
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	4,76			74,39	74,39							74,89	74,89							75,39	75,39							75,89	75,89							76,39	76,39						
4	Indeks iklim kebhinneka	Nilai	76,26			71,17	71,17							72,17	72,17							73,17	73,17							74,17	74,17							75,17	75,17						
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,79			64,47	64,47							65,77	65,77							67,07	67,07							68,37	68,37							69,67	69,67						
	SMPLB																	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN						
1	Kemampuan literasi	Nilai	69,46			61,12	61,12							61,62	61,62							62,12	62,12							62,62	62,62							63,12	63,12						
2	Kemampuan numerasi	Nilai	56,3			58,76	58,76							59,01	59,01							59,26	59,26							59,51	59,51							59,76	59,76						
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	4,76			72,03	72,03							73,23	73,23							74,43	74,43							75,63	75,63							76,83	76,83						
4	Indeks iklim kebhinneka	Nilai	76,26			70,21	70,21							72,01	72,01							73,81	73,81							75,61	75,61							77,41	77,41						
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,79			64,68	64,68							66,08	66,08							67,48	67,48							68,88	68,88							70,28	70,28						
	SMALB																	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN							APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN						
1	Kemampuan literasi	Nilai	69,46			66,21	66,21							66,71	66,71							67,21	67,21							67,71	67,71							68,21	68,21						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi Pencapaian Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi Pencapaian Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi Pencapaian Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi Pencapaian Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi Pencapaian Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Komitmen pemerintah daerah	Nilai	56,3			62,86	62,86							63,36	63,36							63,86	63,86					64,36	64,36							64,86	64,86						
3	Indeks fiskal daerah	Nilai	4,76			64,05	64,05							65,35	65,35							66,65	66,65					67,95	67,95							69,25	69,25						
4	Indeks ketimpangan gender	Nilai	76,26			69,38	69,38							71,38	71,38							73,38	73,38					75,38	75,38							77,38	77,38						
5	Indeks ketimpangan multidimensional	Nilai	60,79			57,77	57,77							59,37	59,37							60,97	60,97					62,57	62,57							64,17	64,17						

Tabel 3.8 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Ini lai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencetma Layanan Dasar	Realisasi Pencetma Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencetma Layanan Dasar	Realisasi Pencetma Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencetma Layanan Dasar	Realisasi Pencetma Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencetma Layanan Dasar	Realisasi Pencetma Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Pencetma Layanan Dasar	Realisasi Pencetma Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	SPM KESEHATAN							611.678.725								711.678.725								811.678.725								911.678.725								1.011.678.725			
1	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Setiap Jenjang Kelas Kesehatan Akibat Bencana Geofatas Gempa Bumi Di Kecamatan Pantai Barat**	Orang	2726 14	1.000	1.000			301.694.500		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1.100	1.100			351.694.500		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1.200	1.200			401.694.500		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1.300	1.300			451.694.500		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1.400	1.400			501.694.500		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH PESERIMA YANG HARUS DILAYANI (SPM BIDANG KESEHATAN) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	2726 15	500	500					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	550	550					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	600	600					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	650	650					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	700	700					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH PESERIMA YANG HARUS DILAYANI (PENANGGAP DARURAT) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	2724 0	500	500					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	550	550					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	600	600					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	650	650					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	700	700					APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
	PRA KRISIS KESEHATAN																																										
1	Kebutuhan penggunaan radio komunikasi kesehatan bagi pendudukh yang tinggal di wilayah administrasi bencana (pemerintah/masyarakat)	Orang	2726 16			500	500	4.694.500						550	550	14.694.500						600	600	24.694.500						650	650	34.694.500						700	700	44.694.500			
2	Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan	Orang	80			80	80							80	80							40	40					40	40							40	40						
2	Sarana dan prasarana	Unit	6382			6	6	270.000.000						6	6	290.000.000						3	3	290.000.000						3	3	300.000.000						3	3	310.000.000			
	TAHAP PENANGGAP DARURAT																																										
1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	50			500	500	500.000						550	550	10.500.000						600	600	20.500.000						650	650	30.500.000						700	700	40.500.000			
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil dan Anak (PMKA) meliputi pelayanan KB dan pemantauan tumbuh kembang balita, estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak /korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan	Orang	5911			1.000	1.000	1.000.000						1.050	1.050	11.000.000						1.100	1.100	21.000.000						1.150	1.150	31.000.000						1.200	1.200	41.000.000			
3	Makanan Tambahan untuk ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (pemantauan tumbuh kembang balita, estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak /korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	67			1.000	1.000	1.000.000						1.050	1.050	11.000.000						1.100	1.100	21.000.000						1.150	1.150	31.000.000						1.200	1.200	41.000.000			
4	Kelengkapan pendukung	Orang	7276			500	500	500.000						550	550	10.500.000						600	600	20.500.000						650	650	30.500.000						700	700	40.500.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Initial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Initial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Initial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Initial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Initial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi Persentase Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi Persentase Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi Persentase Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi Persentase Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Persentase Layanan Dasar	Realisasi Persentase Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	d. kesehatan perseorangan (Hygiene Kit dan Family Kit) (Pendidikan Kesehatan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama berwabah)																																												
5	Tenaga kesehatan - Dokter	Orang	8			8	8							8	8							7	7							7	7							7	7						
6	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang	5			5	5							5	5							1	1							1	1							1	1						
7	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang	8			8	8							8	8							1	1							1	1							1	1						
8	Tenaga kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Orang	7			7	7							7	7							4	4							4	4							4	4						
9	Tenaga kesehatan - Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	4			4	4							4	4							24	24							24	24							24	24						
10	Tenaga kesehatan - Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	5			5	5							5	5							1	1							1	1							1	1						
11	Tenaga kesehatan - Tenaga gizi	Orang	8			8	8							8	8							1	1							1	1							1	1						
12	Tenaga kesehatan terkait di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	5			5	5							5	5							1	1							1	1							1	1						
2	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kabupaten/ Kota Kejadian Luar Biasa Provinsi**	**Orang**	**62 44 52**	1.000	1.000			309.984.225		APB D/A PBN	Dinkes	1.100	1.100			359.984.225		APB D/A PBN	Dinkes	1.200	1.200			409.984.225		APB D/A PBN	Dinkes	1.300	1.300			459.984.225		APB D/A PBN	Dinkes	1.400	1.400			509.984.225		APB D/A PBN	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (SESPOTE NSI KLB) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitung	**Orang**	**62 44 53**	500	500							550	550							600	600							650	650							700	700						
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI TERJADI KLB) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	**Orang**	**0**	500	500							550	550							600	600							650	650							700	700						
	SESPOTE NSI KLB																																											
1	Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari pemaparan penyakit)	Unit	36 79 6			32	32	3.069.725						32	32	3.200.000						32	32	3.200.000						32	32	3.200.000						32	32	3.200.000					
2	Profilaksis (Vaksin/ Obat/Vaksin) diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko sesuai perencanaan dan memenuhi rantai pemaparan (prinsip)	Paket	11 0			500	500	500.000						500	500	10.500.000						7.533	7.533	30.500.000						7.533	7.533	30.500.000						7.533	7.533	40.500.000					
3	Alat pengiriman spesimen/ Specimen Carrier	Unit	61			61	61	61.000						61	61	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000					
4	Tempat sampah infeksius	Unit	26 37			2.637	2.637	2.637.000						2.637	2.637	30.000						30	30	30.000						30	30	30.000						30	30	30.000					
5	Formulir pencatatan epidemiologi, form/lembar KIE, media visual dll	Formulir	13 71			61	61	61.000						61	61	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000					
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat dll)	Unit	25 29 3			61	61	61.000						61	61	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000						624	624	624.000					
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter manual, dll)	Unit	11 95 2			11.952	11.952	-						11.952	11.952	16.000.000						32	32	16.000.000						32	32	16.000.000						32	32	16.000.000					
8	Tenaga medis - Dokter	Orang	12			12	12							12	12							6	6							6	6							6	6						
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang berpunya an kemanguan di bidang epidemiologi	Orang	19			19	19							19	19							6	6							6	6							6	6						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat kompetensi untuk melakukan kesehatan lingkungan	Orang	12			12	12							12	12							2	2						2	2									2	2					
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat kompetensi untuk melakukan kesehatan di bidang epidemiologi	Orang	3			3	3							3	3							2	2						2	2									2	2					
12	Tenaga Laboratorium	Orang	4			4	4							4	4							2	2						2	2									2	2					
13	Tenaga pemukah/ promosi kesehatan	Orang	20			20	20							20	20							7	7						7	7									7	7					
14	Petugas penanggung jawab program dimonitor/ dievaluasi pada KLB yang terjadi	Orang	29			29	29							29	29							6	6						6	6									6	6					
	KORBAN TERJADI KLB																																											
1	Tata laksana kesehatan (Pemenuhan dan pengaturan) bagi penduduk terdampak KLB di Rumah Sakit	Orang	164			164	164	26.400.000						164	164	26.400.000						410	410	36.400.000					410	410	46.400.000								410	410	56.400.000				

Tabel 3.9 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Jumlah	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	**Penyediaan kebutuhan air minum untuk memenuhi target cakupan layanan Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota**	Orang	7.850	31.814	31.814			68.079.002.441		APBD/APBN	DINAS PU	31.814	31.814			69.079.002.441		APBD/APBN	DINAS PU	31.814	31.814			70.079.002.441		APBD/APBN	DINAS PU	31.814	31.814			71.079.002.441		APBD/APBN	DINAS PU	31.814	31.814			72.079.002.441		APBD/APBN	DINAS PU
	Ada SPAM lintas Kabupaten/ Kota																																											
	SAPADAR AIR CURAH ID SORDI NAT DKI "Tidak masuk dalam hitungan	Liter/detik	11.000,00	11.000,00	11.000,00							11.000	11.000							11.000	11.000							11.000	11.000							11.000	11.000						
	Perang Pada Daerah provinsi yang mengembangkan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/ Kota																																											
1	SPAM lintas Kabupaten/Kota (Jenis Sumber: Sungai, Danau, Air Tanah, Mata Air)	Liter/detik	11.000,00			11.000,00	11.000,00			APBD/APBN	DINAS PU			11.000,00	11.000,00			APBD/APBN	DINAS PU			11.000,00	11.000,00			APBD/APBN	DINAS PU			11.000,00	11.000,00			APBD/APBN	DINAS PU			11.000,00	11.000,00			APBD/APBN	DINAS PU
2	Pembangunan Prasarana Sumber Air Baku yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pemb	Ruas	1.796.756.000			0	0	0		APBD/APBN	DINAS PU			0	0	0		APBD/APBN	DINAS PU			0	0	0		APBD/APBN	DINAS PU			0	0	0		APBD/APBN	DINAS PU			0	0	0		APBD/APBN	DINAS PU

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Penggunaan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota																																										
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (kompilasi dari seluruh Kab/Kota)																																										
	Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai urusan subbidang Air Minum yang memfasilitasi SPAM lintas Kabupaten/Kota																																										
1	Pencatatan, tabulasi, Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Penyelenggaraan Penggunaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0			0	0	0		APBD/DAK PBN	DINAS PU			0	0	-		APBD/DAK PBN	DINAS PU			0	0	-		APBD/DAK PBN	DINAS PU			0	0	-		APBD/DAK PBN	DINAS PU			0	0	-		APBD/DAK PBN	DINAS PU
2	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendapatan, pengeluaran kabupaten dan permasalahan)	Jumlah/Kasus	0			0	0							0	0							0	0							0	0							0	0						
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**	**Orang**	109.455	109.455	109.455			6.000.000.000		APBD/DAK PBN	DINAS PU	109.455	109.455			7.000.000.000		APBD/DAK PBN	DINAS PU	109.455	109.455			8.000.000.000		APBD/DAK PBN	DINAS PU	109.455	109.455			9.000.000.000		APBD/DAK PBN	DINAS PU	109.455	109.455			10.000.000.000		APBD/DAK PBN	DINAS PU
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota																																										
	PENERAPAN LAYANAN AIR DARAH S.D. KORDIK LAT 1301 (REKAPITULASI) "tidak masuk dalam hitungan Target : total warga negara yang dimaksudkan sendapatkan layanan SPALD -T maupun SPALD-S yang sesuai dengan kewenangan provinsi jumlah data pemerintah)	**Orang**	109.455	109.455	109.455							109.455	109.455							109.455	109.455							109.455	109.455							109.455	109.455						

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran		Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Cepatan adalah warga negara yang telah menda patkan layanan SPALD -T maupun SPALD -S yang wenang di kewenangan provinsi																																		
	Belum warga negara yang belum terlayani SPALD -T maupun SPALD -S yang wenang di kewenangan provinsi																																		
	(sesuai data pemenuhan)																																		
	Perangkat Daerah provinsi yang mengelola sanitasi/ pengelola bidang air limbah yang memiliki UPTD SPALD regional lintas Kabupaten/ Kota																																		
	SPALD regional lintas Kabupaten/ Kota																																		
1	**KUALITAS SPALD**																																		
	a. Ukuran kuantitatif penyelenggaraan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Jiwa/ Jam/ Hari	21.891			21.891	21.891			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.891	21.891			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.891	21.891			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.891	21.891			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK
1	**KUALITAS SPALD**																																		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)																																		
	a. Ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan Akses pengolahan terhadap fasilitas bangunan besar individual dimana mengalirkan atau dikumpulkan kemudian diolah di IPALD Regional	Jiwa/ Jam/ Hari	21.491			21.491	21.491			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.491	21.491			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.491	21.491			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK			21.491	21.491			APBD/ DAK/ PBN	DINAS DCK TK
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Belum Tersedia Dan Belum Diterapkan Secara																																		
	b. Ukuran	Jiwa/ Jam/	0			0	0			APBD	DINAS			0	0			APBD	DINAS			0	0			APBD	DINAS			0	0			APBD	DINAS

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Jumlah Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang berimukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di wilayah perkotaan dimana bangunan utama dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan lainnya dilengkapi kloset jongkok dan tangki septik sesuai standar dengan pengurasan/siapdisedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan dilaporkan ke DPLH Kepulauan	Jiwa	400							N/A PSPM	DCK TK							N/A PSPM	DCK TK							N/A PSPM	DCK TK							N/A PSPM	DCK TK							N/A PSPM	DCK TK
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang berimukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dimana bangunan utama dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan lainnya tersedia septik sesuai standar dan terpisah dengan sumber air minum (sumur) dan tidak terkena genangan air	Jiwa	400			400	400			APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			400	400			APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			400	400			APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			400	400			APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			400	400			APBD/DAPBN	DINAS DCK TK
2	Pembinaan bantuan Kepada pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Jiwa	-			0	0	-		APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			0	0	-		APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			0	0	-		APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			0	0	-		APBD/DAPBN	DINAS DCK TK			0	0	-		APBD/DAPBN	DINAS DCK TK
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (Jangkauan evidence terhadap Kab/Kota)																																										
	Perencanaan Pembangunan Prasarana																																										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Yang merupakan rincian tambahan sub-bidang air limbah yang berasal dari (ki) SPALD-setan Daerah Kabupaten/Kota																																										
1	Pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Jiwa	-			0	0	-		APBD DAK PBN	DINAS DCKTR			0	0	-		APBD DAK PBN	DINAS DCKTR			0	0	-		APBD DAK PBN	DINAS DCKTR			0	0	-		APBD DAK PBN	DINAS DCKTR			0	0	-		APBD DAK PBN	DINAS DCKTR
2	Terbangunnya SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) Kabupaten/Kota (pembinaan pengelolaan kebutuhan dan pervoir	Jumlah Kab/Kota	-			2	2	-						2	2	-						2	2	-						2	2	-						2	2	-			

Tabel 3.10 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	SPM PERUMAHAN RAKYAT							**200.000.000**								**210.000.000**								**220.000.000**								**230.000.000**								**240.000.000**			
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bagi Korban Bencana Provinsi**	Orang	0	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA	0	0			**210.000.000**		APBD	DISPERKIMTA	0	0			**220.000.000**		APBD	DISPERKIMTA	0	0			**230.000.000**		APBD	DISPERKIMTA	0	0			**240.000.000**		APBD	DISPERKIMTA
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tsunami; (segmen) d) Gelombang sunami; e) Banjir bandang; (segmen) f) Tanah longsor. g) Bencana lainnya.																																										
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																																										
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
3	Pemeliharaan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
4	Bantuan sewa rumah sewa sementara bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																																										
	Melaksanakan penggunaan lahan, perkiraan, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan ketentuan/tidak legalnya (dilaksanakan dengan menggunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lain nya)	Jiwa/ Rumah						200.000.000		APBD	DISPERKIMTA					210.000.000		APBD	DISPERKIMTA					220.000.000		APBD	DISPERKIMTA					230.000.000		APBD	DISPERKIMTA					240.000.000		APBD	DISPERKIMTA
	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan	dokumen						-		APBD	DISPERKIMTA					-		APBD	DISPERKIMTA					-		APBD	DISPERKIMTA					-		APBD	DISPERKIMTA					-		APBD	DISPERKIMTA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Pemerintah (contoh : dokumen RPJMP, dsb.)																																										
2	**Fasilitasi Kebakaran Pemukiman Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**	orang	0	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA	0	0			-		APBD	DISPERKIMTA
	a) pengawasan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) penyesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengawasan permukiman yang berada di kawasan bahan fungsi vermukiman; d) pengawasan permukiman yang berada di area/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana)																																										
	Ada Relokasi Program Pemerintah																																										
1	Fasilitasi penggantian tanah dan Bangunan Tanah dan/atau Bangunan					0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-						0	0	-						0	0	-				
	a. Pindahan oleh tim provinsi/	Unit Rumah	0			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-						0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA
	c. Proses penggantian tahap sesuai dengan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA
2	Bantuan sewa Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0			0	0	-		APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA			0	0			APBD	DISPERKIMTA
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																																										
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan penyediaan sesuai dengan rencana/aktor program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan menanggah dokumen ikrin dan/atau dokumen pendukung lain ons)	Ikrin tahapan								APBD	DISPERKIMTA							APBD	DISPERKIMTA							APBD	DISPERKIMTA							APBD	DISPERKIMTA							APBD	DISPERKIMTA

Tabel 3.11 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**	Orang	400	400	400			8.166.377.644		APBD	SATPOL PP	400	400			8.266.377.644		APBD	SATPOL PP	400	400			8.366.377.644		APBD	SATPOL PP	400	400			8.466.377.644		APBD	SATPOL PP	400	400			8.566.377.644		APBD	SATPOL PP
	Sarana prasarana Satpol PP yang terstandar tahun ke-1 (hanya sebagai informasi)	unit	100	100	100							100	100							100	100							100	100							100	100						
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang meliputi pengadaan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional) pada tahun berjalan)	unit	100			100	100	-		APBD	SATPOL PP			100	100	-		APBD	SATPOL PP			100	100	-		APBD	SATPOL PP			100	100	-		APBD	SATPOL PP			100	100	-		APBD	SATPOL PP
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Ttrantramnas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP Penegakan Perda/Perkada, deradak dini/segah dini, pembinaan/penyuluhan, pengawasan,	dokumen	4			4	4	-		APBD	SATPOL PP			4	4	-		APBD	SATPOL PP			4	4	-		APBD	SATPOL PP			4	4	-		APBD	SATPOL PP			4	4	-		APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan untuk rasa aman dan ketenteraman masyarakat																																										
3	Pemenuhan standar pembinaan kepada anggota Satpol PP dan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ASN yang telah lulus diklat dasar/ Satpol PP* dan Linmas yang telah mengikuti pembinaan kepada anggota	orang	50			50	50	-		APBD	SATPOL PP			50	50	-		APBD	SATPOL PP			50	50	-		APBD	SATPOL PP			50	50	-		APBD	SATPOL PP			50	50	-		APBD	SATPOL PP
4	Pemenuhan standar pelayanan yang perlindungan dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian materiil diterbitkan dengan SPKAD serta perangkat daerah yang memfilangi kepemilikan, saer, pekerjaan permukiman dan pelayanan pengaduan fasilitasi dengan pengaduan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			1	1	-		APBD	SATPOL PP			1	1	-		APBD	SATPOL PP			1	1	-		APBD	SATPOL PP			1	1	-		APBD	SATPOL PP			1	1	-		APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil fasilitasi akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan penganbatan (pertolongan pertama yang terluka cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke fasilitas sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terluka cidera fisik sedang dan/atau berat	orang	0			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP			0	0	-		APBD	SATPOL PP

Tabel 3.12 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Provinsi Sumatera Utara 2026-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPM SOSIAL							**27.879.151 .112**								**27.414.794 .178**								**27.445.042 .172**								**28.062.793 .173**											
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**	**Orang**	**466**	768	768			11.134.872.404		APBD	DINAS SOSIAL	769	769			11.145.872.404		APBD	DINAS SOSIAL	770	770			10.991.531.880		APBD	DINAS SOSIAL	771	771			11.002.531.880		APBD	DINAS SOSIAL	772	772			11.013.531.880		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan perlindungan diberoh yang eubah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan pelayanan di daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/sesuna dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	466			768	768	9.677.847.353		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	9.678.847.353		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	9.679.847.353		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	9.680.847.353		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	9.681.847.353		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, beberuhkan khusus, alas kaki, perlengkapan tidoleh	Orang	466			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	1	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	1	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	1	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	1	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan alat bantu dengar, kaca mata, penerjemah dan pengukiran, alat bantu dengar, kruk, tripod, walker, kursi roda, tongkat, angkat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan keburuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat	Orang	466			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perlindungan kesehatan didalam Panti (obat pelkesi, obat umum, vitaminetc, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan pelkesi, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	466			768	768	141.692.093		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	142.692.093		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	143.692.093		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	144.692.093		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	145.692.093		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat bantu lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/auth ing/senam, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan pelbelagai yang dirujukan mengatasi masalah pelbagai	Orang	466			768	768	917.897.960		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	918.897.960		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	919.897.960		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	920.897.960		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	921.897.960		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan sehari-hari yang dilakukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat bantu lainnya)	Orang	466			768	768	222.094.474		APBD	DINAS SOSIAL			769	769	223.094.474		APBD	DINAS SOSIAL			770	770	224.094.474		APBD	DINAS SOSIAL			771	771	225.094.474		APBD	DINAS SOSIAL			772	772	226.094.474		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Akte/ kepemilikan NIK	Orang	466			10	10	-		APBD	DINAS SOSIAL			11	470	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			12	470	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			13	470	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			14	470	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	466			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	470	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	470	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	470	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	470	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan pendampingan keluarga/Ibuki keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	466			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	470	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	470	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	470	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	470	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan pendampingan (pencadangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pengasuhan yang layak yang berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	466			768	768	-		APBD	DINAS SOSIAL			769	470	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			770	470	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			771	470	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			772	470	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti**	**orang**	**22**	345	345			5.840.356.953		APBD	DINAS SOSIAL	346	346			5.852.356.953		APBD	DINAS SOSIAL	347	347			5.864.356.953		APBD	DINAS SOSIAL	348	348			5.876.356.953		APBD	DINAS SOSIAL	349	349			5.888.356.953		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan (upaya untuk memenuhi keburuhan akan kasih sayang, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang merentap dan berkesinjutan demi terpenuhinya yang terbaik bagi anak)	Orang	22			345	345	156.550.741		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	157.550.741		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	158.550.741		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	159.550.741		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	160.550.741		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di sekitarnya dengan cara perhitungan sesuai dengan keterutan peraturan perundang-undangan)	Orang	22			345	345	4.511.312.984		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	4.512.312.984		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	4.513.312.984		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	4.514.312.984		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.515.312.984		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (berupa jaskain, pakaian dalam, kaos, kerbarhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan keburuhan)	Orang	22			345	345	18.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	19.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	21.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	22.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan asrama yang sudah diskera (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di sekitarnya dengan cara perhitungan sesuai dengan keterutan peraturan perundang-undangan)	Unit	1			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	1	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	1	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	1	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	1	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perlindungan kesehatan didalam Panti (obat pelkesi, obat umum, vitaminetc, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan pelkesi, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22			345	345	13.919.498		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	14.919.498		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	15.919.498		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	16.919.498		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	17.919.498		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat bantu lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/auth ing/senam, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan pelbelagai yang dirujukan mengatasi masalah pelbagai	Orang	22			345	345	577.445.000		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	578.445.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	579.445.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	580.445.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	581.445.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025 *	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif/perwangkilan dasar yang diperlukan untuk menawar diri secaliri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat rujuk lain)	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditunjuk bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat pemberian fasilitasi pendaftaran orang yang sudah memiliki NIK)	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan pemberdayaan keluarga/ibu/ keberdayaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (penyatuangan dan pengembalian anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
12	Akses layanan pengganti keluarga kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Telantar yang diasuh/akan melalui keluarga asuh, perwalian, pengangkatan anak, atau lembaga/akan calon keluarga penggantri bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam lingkungan berbasis keluarga (Kriteria Sosial Budaya)	Orang	22			345	345	-		APBD	DINAS SOSIAL			346	346	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			347	347	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			348	348	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			349	349	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**	**unit**	**26**	339	339			6.016.135.5 14		APBD	DINAS SOSIAL	340	340			6.028.135.5 14		APBD	DINAS SOSIAL	341	341			6.030.024.0 14		APBD	DINAS SOSIAL	342	342			6.042.024.0 14		APBD	DINAS SOSIAL	343	343			6.054.024. 014		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permaknaan (kerah) yang sudah memiliki pasti, daerah yang belum memiliki pasti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki pasti dapat merujuk pasti sosial milik masyarakat di wilayahnya/sewana dengan cara perhitungan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	26			339	339	4.536.100.0 04		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	4.537.100.0 04		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	4.538.100.0 04		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	4.539.100.0 04		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.560.100. 004		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan seragam (kerja pakaian, perlengkapan mandi, keburuhan khusus, alas kaki, perlengkapan (kedah sosial dengan ketentuan)	Orang	26			339	339	26.465.000		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	27.465.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	28.465.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	29.465.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	30.465.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang (kerah dan mampu (kerah yang sudah memiliki pasti, daerah yang belum memiliki pasti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki pasti dapat merujuk pasti sosial milik masyarakat di wilayahnya/sewana dengan cara perhitungan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Unit	1			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	1	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	1	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	1	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	1	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemerikasaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat pencarian adaptif) dan modifikasi untuk usia senia dan sesuai dengan keburuhan penerima disabilitas)	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan diduksi Panti (obat pakiatri, obat kesehatan, alat timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, banor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan pakiatri, dan/atau tenaga kerja sosial kerdik dan sesuai dengan keburuhan)	Orang	26			339	339	51.340.030		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	52.340.030		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	53.340.030		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	54.340.030		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	55.340.030		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat bantu lainnya) bimbingan fisik, mental, spiritual untuk meotolkara dan meningkatkan kreatkan jasmani peserima pelayanan/diabnga/auth ound/gm, bimbingan sosial yang salah adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial	Orang	26			339	339	1.308.118.9 80		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.309.118.9 80		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	1.310.118.9 80		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	1.311.118.9 80		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	1.312.118. 980		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif/perwangkilan dasar yang diperlukan untuk menawar diri secaliri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat rujuk lain)	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditunjuk bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat pemberian fasilitasi pendaftaran orang yang sudah memiliki NIK)	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan pemberdayaan keluarga/ibu/ keberdayaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (penyatuangan dan	Orang	26			339	339	-		APBD	DINAS SOSIAL			340	340	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			341	341	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			342	342	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			343	343	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	5	6	7	8	9	10	11	12
	penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)																																										
12	Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	26			5	5	54.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			6	6	55.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			7	7	56.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			8	8	57.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			9	9	58.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	orang	16	205	205			3.361.179.325		APBD	DINAS SOSIAL	206	206			3.381.179.325		APBD	DINAS SOSIAL	207	207			3.391.179.325		APBD	DINAS SOSIAL	208	208			3.401.179.325		APBD	DINAS SOSIAL	209	209			3.411.179.325		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	16			205	205	2.537.326.036		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	2.538.326.036		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.539.326.036		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	2.540.326.036		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	2.541.326.036		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Unit	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	1	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	1	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	1	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	1	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	16			205	205	19.474.820		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	20.474.820		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	21.474.820		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	22.474.820		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	23.474.820		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang	16			205	205	495.790.104		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	496.790.104		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	497.790.104		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	498.790.104		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	499.790.104		APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	16			205	205	308.588.365		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	309.588.365		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	310.588.365		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	311.588.365		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	312.588.365		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	16			205	205	-		APBD	DINAS SOSIAL			206	30	1.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			207	30	2.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			208	30	3.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			209	30	4.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**	orang	2708	1200	0			1.526.606.914		APBD	DINAS SOSIAL	1210	1210			1.007.250.000		APBD	DINAS SOSIAL	1220	1220			1.367.950.000		APBD	DINAS SOSIAL	1230	1230			1.740.701.000		APBD	DINAS SOSIAL	1240	1240			2.125.864.530		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana																																										
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	2708			1200	0	1.468.356.914		APBD	DINAS SOSIAL			1210	1210	889.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			1220	1220	1.189.700.000		APBD	DINAS SOSIAL			1230	1230	1.502.451.000		APBD	DINAS SOSIAL			1240	1240	1.827.614.530		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2708			1200	0	50.850.000		APBD	DINAS SOSIAL			1210	1210	70.850.000		APBD	DINAS SOSIAL			1220	1220	90.850.000		APBD	DINAS SOSIAL			1230	1230	110.850.000		APBD	DINAS SOSIAL			1240	1240	130.850.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan	Unit	2			5	0	-		APBD	DINAS SOSIAL			5	5	-		APBD	DINAS SOSIAL			5	5	-		APBD	DINAS SOSIAL			5	5	-		APBD	DINAS SOSIAL			5	5	-		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Mutu Layanan Dasar	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	5	6	7	8	9	10	11	12
	terhentinya kasirja secara terhurtiharti																																										
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, Ibu Hamil, Perempuan Menyusui, Anak-anak, seperti pojok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	560			600	0	7.400.000		APBD	DINAS SOSIAL			610	610	27.400.000		APBD	DINAS SOSIAL			620	620	47.400.000		APBD	DINAS SOSIAL			630	630	67.400.000		APBD	DINAS SOSIAL			640	640	87.400.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial(pspa)/dukungan yang diberikan oleh individu, kelompok/komunitas untuk mengatasi masalah emosional dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan memfasilitasi penyesuaian diri terhadap tekanan/masalah sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, bilisetan/trauma healing, dll)	Orang	27			600	0	-		APBD	DINAS SOSIAL			610	610	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			620	620	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			630	630	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			640	640	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana Gemeinten Fore GAL GRA KBY KCS) USCI.																																										
1	Rencana/SOP penanganpalan bencana, kebakaran, kebhurtiban, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dijelaskan dalam dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form																																									



BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

4.1.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

4.1.1.1 Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. Pendidikan menengah;
2. Pendidikan khusus;

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah:

a. Pendataan anak tidak sekolah *by name by addres* pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
b. Penyediaan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar diutamakan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
c. Peningkatan jumlah rombongan belajar jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
d. Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
e. Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus:

a. Pendataan anak tidak sekolah *by name by addres* pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
b. Penyediaan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar diutamakan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
c. Peningkatan jumlah rombongan belajar jenjang sekolah pendidikan khusus;
d. Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
e. Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan

miskin pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah pendidikan khusus;
g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah pendidikan khusus;

4.1.1.2 Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan:
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi:

a. Pendataan dukungan logistik kesehatan:
   1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai;
   2) Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll);
   3) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (*Hyegiene Kit* dan *Family Kit*).
b. Pemenuhan kebutuhan minimal pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
c. Pemenuhan Jumlah minimal SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
d. Pemenuhan Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
e. Melaksanakan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi:

a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia:
   1) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit;
   2) Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin;
   3) Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter,Senter, Test Diagnosis Cepat, dll);
   4) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit;
   5) Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier);

6) Tempat Sampah Biologis;
7) Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan.

b. Pemenuhan Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi;
c. Melaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/ informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota.

4.1.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Layanan:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Daerah Kabupaten/Kota:

a. Pendataan untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
b. Peningkatan Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota;
c. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota;
d. Penyusunan JAKSTRADA provinsi;
e. Pemenuhan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota melalui BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM;
f. Kemudahan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM;
g. Peningkatan kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.

Strategi dan Kebijakan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Daerah Kabupaten/Kota:

a. Pendataan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional;
b. Peningkatan Jumlah SPALD Regional;
c. Peningkatan kapasitas SPALD Regional;
d. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik;
e. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak);
f. Peningkatan Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan ;
g. Peningkatan Pelayanan Penyediaan Prasarana dan/atau Jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman.

4.1.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Layanan:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi:

a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

4.1.1.5 Bidang Tramtibum

Jenis Layanan:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi;
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi:

a. Pendataan *by name by address* dalam radius 0-50 m warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada;
b. Penyusunan Pergub yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil;
c. Pemenuhan pelayanan kerugian materil;
d. Pemenuhan pelayanan kerugian pelayanan pengobatan;
e. Penegakan Perda sesuai SOP;
f. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar;
g. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar;
h. Peningkatan prosentase Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani;
i. Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan;

j. Pemenuhan Jumlah sarana prasarana minimal;
k. Peningkatan Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan;
l. Peningkatan Prosentase Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS;
m. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.1.6 Bidang Sosial

Jenis Layanan:

1. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti:

a. Pendataan *by name by address* penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
b. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
c. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti);
e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti;
f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
g. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
h. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti;
i. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti;
j. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
k. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
l. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti;
m. Pemenuhan Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti;
n. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan

kesehatan dasar;
o. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga;
p. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti:

a. Pendataan *by name by address* anak terlantar di dalam panti;
b. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
c. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti);
e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti;
g. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
h. Pemenuhan Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
i. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
j. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
k. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
l. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
m. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti;
n. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar;
o. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
p. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
q. Pemenuhan Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti:

a. Pendataan *by name by address* lanjut usia terlantar di dalam panti;
b. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima

paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
c. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses;
e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
g. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
h. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
i. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
j. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
k. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
l. Pemenuhan Jumlah Lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti;
m. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar;
n. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
o. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
p. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan.

Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;

a. Pendataan *by name by address* tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
b. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
c. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti;
d. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses;
e. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
f. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
g. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
h. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;

i. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
j. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
k. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
l. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar;
m. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti;
n. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar;
o. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
p. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga;
q. Pemenuhan Pemulangan ke Daerah Asal.

Strategi dan Kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi:

a. Pendataan *by name by address* korban bencana provinsi;
b. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang mendapat makanan;
c. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang;
d. Pemenuhan Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki;
e. Pemenuhan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan;
f. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial;
g. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.

4.2 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah

digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. **Ketaatan/*compliance***, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Pemeriksaan/*auditing***, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. **Laporan/*accounting***, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. **Penjelasan/*explanation***, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Utara, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau

tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

→ **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
   (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
   (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
   (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
   (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

→ **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk
2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas

kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

→ **Manajemen Kerja**. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

→ **Pendanaan**. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu

berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.3 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

A. **Indeks Pencapaian SPM**. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   a) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
   b) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
   c) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B. **Anggaran SPM**. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   a) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
   b) Bagaimana SPM diposisikan?
   c) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
   d) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan 45 SPM?
   e) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

C. **Permasalahan SPM**. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   a) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
   b) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
   c) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

4.4 Koordinasi SPM

Pada Pasal 16 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional.
(2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi.
(3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
   a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM;
   b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
   a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
   b. tim Penerapan SPM daerah provinsi;
   c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

(1) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan beranggotakan kementerian/ lembaga yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
f. Sosial.

(2) Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(3) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

(1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Penanggung jawab : Gubernur;
b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
c. Wakil Ketua : Kepalabadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
d. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Atau Sebutan Lain;
e. Anggota :
→ Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
→ Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
→ Kepala inspektorat daerah;
→ Kepala dinas komunikasi dan informatika;
→ Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
→ Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
b. Melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
c. Melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi

dan daerah kabupaten/kota;

h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
j. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
m. melakukan rapat secara berkala;
n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

(3) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(4) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 20

(1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk sekretariat tim.
(2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
(2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
(3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
(4) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.

(5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

(6) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pendanaan

Pasal 29

(1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

4.5 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Pasal 23 disebutkan bahwa:

(1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

(1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 25

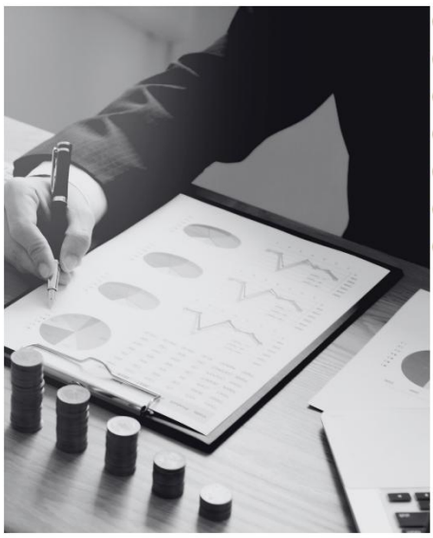
Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

a. Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
b. Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat;
c. Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.













BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Utara.
3. Perlu penguatan tim penerapan SPM Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
4. Tim penerapan SPM Provinsi Sumatera Utara secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
5. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung penerapan SPM melalui kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
9. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM
10. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
11. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
12. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan *monitoring* dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
NIP. 19600421 199003 2 003